

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KERANI DI KAMPUNG DAYUN

KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan
pada fakultas ilmu sosial dan politik
Universitas islam riau*



SITI ANDANI PUTRI

NPM : 157310400

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Siti Andani Putri
NPM : 157310400
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak


Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat di setujui untuk disidangkan dalam sidang komperhensif.

Pekanbaru, 18 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Rahyunir Rauf., M.,Si


Syaprianto.,S.Sos.,M.IP

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Siti Andani Putri
NPM : 157310400
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan di nilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu ti, penguji ujian konferensif fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua,



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.si

Pekanbaru, 15 Agustus 2020
Sekretaris,



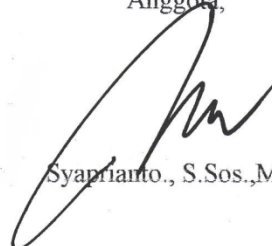
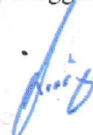
Nina Yuslaini, S.IP., M.Si
Anggota,

Mengetahui,
Wakil Dekan 1,



Indra safri., S.Sos., M.Si

Dr. Khairul Tahman., S.Sos., M.Si
Anggota,



Syaprianto., S.Sos., M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor:145/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 29 Juni 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Selasa tanggal, 30 Juni 2020 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Siti Andani Putri
N P M : 157310400
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.*

Nilai Ujian : Angka : " 76,2 " ; Huruf : " B + "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslima, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khairul Tahman, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, MPA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 30 Juni 2020,
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan / Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 145 /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 258/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Siti Andani Putri**
N P M : 157310400
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

1. Dr. Sri Maulidiah.,S.Sos.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Nina Yuslaini.,S.IP.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dr.Khairul Rahman.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Dr. H. rahynir Rauf.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 5. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP Sebagai Anggota merangkap Penguji
 6. Agung Wicaksono.,MPA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Andani Putri
NPM : 157310400
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

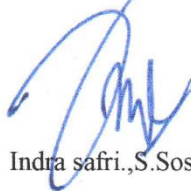
Pekanbaru, 15 Agustus 2020
An.Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.si

Mengetahui
Wakil Dekan I,

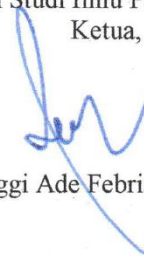


Indra safri.,S.Sos.,M.Si



Nina Yuslaini,S.IP.,M.Si

Turut menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Swt yang maha kuasa atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian sesuai rencana yang berjudul **:Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak**” tanpa halangan suatu apa pun.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat mengikuti ujian usulan penelitian pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. Melalui kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak-pihak yang memberikan dukungan dan motivasi sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Syafrinaldi, S.H.,MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan, memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau ini.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando,S.,IP.,M.Si Selaku Ketua Program Studi dan Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan Ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.

4. Bapak Andriyus, S.Sos.,M.Si Selaku Sekretaris Ketua Program Studi dan Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pemerintahan sehingga telah membantu penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
5. Bapak Dr.H. RahyunirRauf.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan usulan penelitian ini.
6. Bapak Syaprianto.,S,Sos.,M.IP Selaku Dosen Pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan-masukan demi kesempurnaan penyusunan usulan penelitian ini.
7. Dan ucapan terima kasih tak terhingga dari penulis untuk yang Teristimewa kepada orang tua tersayang Ayahanda Samsudirman dan Mariana, atas curahan kasih sayang, untaian do'a, serta motivasi tiada henti dan tak ternilai harganya yang diberikan selama ini.
8. Dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada saudara dan adik-adik yakni Sari Andriani, Sera Arianti, Seri Mulianti,Muhammad Surya Abadi , Sarmiadi yang telah mendoakan selama ini.
9. Teman-Temanku Siti Fatimah, Ririn Wandes Oktavia, Siska Eka Putri, yang telah memberikan dukungan dan motivasinya dan Kawan-kawan Seperjuangan di kelas IP.H angkatan 2015yang telahsama-sama berjuang dan akan selalu dikenang .

10. Dan terimakasih untuk yang terkhusus kepada Saroni yang telah memberikan semangat dan motivasinya atas penyusunan usulan penelitian ini.

Harapan penulis semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya terutama bagi penulis sendiri sehingga mendapatkan tambahan ilmu dalam bidang Ilmu Pemerintahan, serta semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan kasih dan sayang kepada mereka yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 18 Februari 2020

Penulis

Siti Andani Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
LAMPIRAN	ix
SURAT PERNYATAAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
2.1 Konsep Pemerintah dan Pemerintahan.....	19
2.2 Teori Ilmu Pemerintahan.....	20
2.3 Teori Konsep Kebijakan publik	22
2.4 Teori Konsep Organisasi.....	24
2.5 Teori Tugas dan Fungsi Sekretaris.....	26
2.6 Teori Konsep Evaluasi	28
2.7 Teori Manajemen Pemerintahan	31
2.8 Teori Konsep Desa	32
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Pikir.	36

D. Konsep Operasional	38
E. Operasional Variabel.....	39
F. Teknik Pengukuran	41
G. Jadwal Penelitian.....	45
BAB III :Metode Penelitian.....	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Populasi Penelitian.....	47
D. Teknik Penarikan Sampel	47
E. Jenis dan Sumber Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Ringkas	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Siak.....	51
4.2 Profil Kecamatan Dayun	52
4.3 Profil Kampung Dayun	53
B. Struktur Tata Kerja Pemerintahan Kampung Dayun	58
C. Uraian Tugas Dan Fungsi Pokok Pemerintahan Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.....	59
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	66
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	69
C. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan tugas kerani.....	89
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	90
DAFTAR KEPUSTAKAAN	92
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data Absensi Perangkat Kampung Dayun	13
2.2 Penelitian terdahulu.....	34
3.1 Operasional Variabel.....	40
3.2 Jumlah Populasi Penelitian.....	47
3.2 Jumlah Penduduk	55
4.3 Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
4.4 Jumlah Berdasarkan Mata Pencarian	56
4.5 Jumlah Berdasarkan Agama.....	57
5.1 Distribusi jenis kelamin Responden Penelitian	67
5.2 Distribusi Responden Penelitian Pemerintahan Kampung Berdasarkan Umur.....	67
5.3 Distribusi Responden Peneliti Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
5.4 Distribusi Jawaban Responden Pemerintahan Desa Dayun Mengenai Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan Membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung	71
5.5 Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Mengenai melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahankampung.....	72
5.6 Distribusi jawaban Responden Pemerintahan Kampung Mengenai melaksanakan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatankampung	75
5.7 Distribusi jawaban Responden masyarakat mengenai melaksanakan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung	76
5.8 Distribusi jawaban responden pemerintahan desa mengenai Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung dan menyusun program kerja penghulu	79

5.9	Distribusi jawaban responden masyarakat mengenai Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung dan menyusun program kerja penghulu	81
5.10	Distribusi jawaban responden pemerintah desa dalam Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan sesuai dengan bidang kesekretariatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan penghulu	84
5.11	Distribusi jawaban responden masyarakat dalam Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan sesuai dengan bidang kesekretariatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan penghulu	86
5.11	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Kerangka fikir pelaksanaan tugas kerani di kampung dayun kecamatan dayun kabupaten siak.....	37
4.1 : struktur Organisasi pemerintahan kampung dayun Kecamatan dayun kabupate siak.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1. Daftar Kuesioner Perangkat Kampung Terkait Dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	97
2. Daftar Kuesioner Masyarakat Terkait Dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	107
3. Daftar Wawancara Perangkat Kampung Terkait Dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.....	113
4. Daftar Telly Terkait Dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	118
5. Foto Dokumentasi Peneliti Terkait Dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	121
6. Surat Balasan Dari Pemerintahan Kampung Dayun Terkait Dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.....	127

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Andani Putri
NPM : 157310400
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah seminar ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekabari, 24 Februari 2020
METERAI
TEMPEL
TGL 20
22EF0AHF843913067
6000
ENAM RIBURUPIAH
Pernyataan,

Siti Andani Putri

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KERANI DI KAMPUNG DAYUN KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

ABSTRAK

Siti Andani Putri
157310400

Kata Kunci : Evaluasi , Tugas , Kerani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Ada pun indikator pelaksanaan tugas kerani yaitu Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Melaksanakan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung, Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan ,dan mengevaluasi penyusunan program kerja penghulu, Melaksanakan tugas dan fungsi Penghulu apabila Penghulu berhalangan sesuai dengan bidang tugas kesekretariatan dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Penghulu. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh kerani di kampung dayun kecamatan dayun kabupaten siak. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif dengan lokasidi kampung dayun kecamatan dayun kabupaten siak.jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data melalui hasil observasi, survey, kuesioner penelitian. Setelah data-data diperoleh lalu dikelompokan menurut jenis nya dalam sebuah tabel, kemudian data tersebut dianalisis dan di uraikan sehingga kesimpulan dapat diambil. Berdasarkan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa evaluasi pelaksanaan tugas kerani di kampung dayun kecamatan dayun kabupaten siak dari keseluruhan indikator berada pada kategori cukup baik dengan persentase 54% . Sedangkan untuk faktor penghambat nya yaitu : (1) Pelayanan masih manual jadi sering membuang waktu. (2)Kurang nya peran kerani dalam menjalankan tupoksi. (3) Keterbatasan sumber daya manusia sehingga penyusunan laporan dan anggaran selalu tertambat.(4) Kurangnya pelatihan dan penguasaan dalam penguasaan teknologi.

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KERANI DI KAMPUNG DAYUN KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

ABSTRAK

Siti Andani Putri
157310400

Keywords: Evaluation, Tasks, Karani

This study aims to determine the Implementation of the Duties of Clerks in Dayun Village in Dayun Sub-District of Siak Regency and to find out the obstacles that affect the implementation. There are also indicators of the performance of clerical duties, namely carrying out correspondence, filing and compiling reports on village administration implementation, carrying out village administration and organizing village secretariat, compiling policies and coordinating, and evaluating the preparation of the headman work program, executing the tasks and functions of the headman when the headman is absent in accordance with secretarial tasks and Carry out other tasks given by the Head. The purpose of this research is to find out how the tasks carried out by clerks in Dayun village, Dayun Subdistrict, Siak Regency. This type of research is a descriptive survey with locations in Dayun Village, Dayun Subdistrict, Siak Regency. Types and sources of data that will be used are primary data and secondary data, while data collection through observations, surveys and research questionnaires. After the data is obtained then grouped according to its type in a table, then the data is analyzed and described so that conclusions can be drawn. Based on the results of this study, it is known that the evaluation of the performance of clerical duties in Dayun Village, Dayun Subdistrict, Siak Regency, of all indicators is in the quite good category with a percentage of 57%. As for the inhibiting factors, namely: (1) Service is still manual so it often wastes time. (2) The lack of a clerk's role in carrying out his duties and functions. (3) Limited human resources so that the preparation of reports and budgets is always hampered (4) Lack of training and mastery in the use of technology.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut dalam pemerintahan yang diatur oleh pemerintahan pusat.

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan Negara. Adapun tujuan pembangunan secara umum terdapat dalam undang-undang 1945 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Dalam rangka mencapai tujuannya, Negara dijalankan suatu pemerintah. Dengan kata lain pemerintah adalah pelaksana kekuasaan Negara. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam suatu wilayah dan menjalankan fungsi utama pemerintahan yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan.

Pembangunan pada Negara-negara berkembang seperti Indonesia merupakan sesuatu unsur yang sangat penting untuk mengubah kondisi

kemasyarakatan kearah yang lebih baik. Karna pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modrenitas dalam rangka pembinaan bangsa (siagian, 2002:4). Oleh sebab itu pembangunan dilaksanakan dalam berbagai bidang meliputi pembangunan dalam bidang ekonomi dan sosial budaya pada Negara merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat sampai pada system pemerintahan daerah sekalipun.

\Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintah, baik ditingkat pusat maupundi tingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa.Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan ang optimal dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal ini untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh hendaknya dimulai dari pemerintahan terendah agar semuanya merata dan dapat merasakan pemerintahaan yang baik sesuai tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan bersama.

Dalam penyelenggaraan susunan pemerintahan dibagi menjadi pemerintahan pusat dan terdiri dari berbagai tingkat pemerintahan daerah, yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota, undang-undang No.32 tahun 2014 Urusan pemerintah terbagi menjadi 3 bagian, urusan pemerintahan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusatn dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
3. Urusanpemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

4.

Ketiga urusan tersebut dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pemerintah pusat dan daerah yang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan terdiri atas asas dekonsentrasi, desentralisasi, serta asas tugas pembantuan.

Dalam Undang-undang No.32/2004 dalam Bab XI pasal 200 membagi kembali pemerintahan daerah menjadi tingkat yang lebih kecil dengan membentuk pemerintahan desa. Hal ini mempunyai arti pemerintahan desa secara hierarki merupakan bagian dari pemerintah terendah dalam sistem pemerintahan republik Indonesia tidak kecuali dalam sistem pemerintahannya baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang dibebankan pada perangkat pemerintahan tersebut dalam pembangunan Negara Indonesia ini.

Selanjutnya dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan yang terendah dibentuk di daerah kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam pasal 372 (1) pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menegaskan sebagai urusan pemerintahan yang kewenangannya kepada desa.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan istilah nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah negari, di Aceh dengan istilah *gampong*. Di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Selanjutnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. pemerintahan desa menjadi sasaran utama dalam penyelenggaraan aktifitas kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban, mengingat pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional yang menyeluruh.

Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak di bangun ditingkat pemerintah terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan karena proses administrasi merupakan proses awal dalam kelangsungan pemerintahan yang baik untuk mengayomi masyarakat, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaanya serta aspek-aspek lainnya, misalnya dengan adanya kerjasama antar aparatur desa yang baik untuk tercapainya pemerintahan yang baik. Dalam hal ini pelaksanaan pemerintahan kampung merupakan hal yang bersih dan baik sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal tersebut sangat penting, karena pemerintahan kampung serta aparaturnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan

maupun sebagai Pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaanya baik dari penghulu maupun dari perangkat kampung seperti Kerani yang mempunyai kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah kampung.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 menegaskan, yakni pemerintah desa adalah penghulu atau yang di sebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung yaitu melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hanif Nurcholis (2011:2) mengemukakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditingali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relative sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu oleh perangkat kampung, kemudian dijabarkan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa perangkat desa terdiri atas; kerani, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis pimpinan memegang penting dalam memberikan pelayanan baik penghulu maupun sebagai Pembina kepegawaian yang ada dibawah kewenangannya.

Pemerintahan kampung terdiri dari penghulu bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan masyarakat kampung. Dalam melaksanakan tugasnya penghulu berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung;

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kampung
- d. Menetapkan peraturan kampung;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja kampung;
- f. Membina kehidupan masyarakat kampung;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian serta mengintegritas skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kampung;
- i. Mengembangkan sumber pendapatankampung;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung;
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat kampung;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
- n. Mewakili kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya perangkat kampung khususnya kerani bertugas membantu penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat kampung bertanggung jawab kepada kepala desa. Adapun mekanisme pengangkatan perangkat kampung harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau yang sederajat.
- b. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun
- c. Terdaftar sebagai penduduk kampung dan bertempat tinggal di kampung paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Menurut peraturan pemerintah menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 mengatur mengenai pengangkatan perangkat kampung sebagai berikut yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam PP kampung:

- a. Kepala desa atau disebut dengan nama lain Penghulu dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

- b. Kepala desa atau penghulu melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung yang dilakukan oleh tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat kampung dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat kampung kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat kampung sekurang-kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh penghulu atau camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat kampung selambat-lambatnya 7 hari kerja
- f. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal camat memberikan persetujuan, penghulu menerbitkan keputusan penghulu tentang pengangkatan perangkat kampung
- h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, penghulu melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat kampung.

Selanjutnya adapun mengenai jika ada pemberhentian perangkat kampung lama memang harus diberhentikan untuk kemudian di ganti dengan perangkat kampung yang baru tentu ada alasannya, adapun alasan pemberhentian perangkat kampung yaitu;

- a) Usia telah genap 60 tahun
- b) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c) Berhalangan tetap
- d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampung dan;
- e) Melanggar larangan sebagai perangkat kampung;

Dalam pemberhentian perangkat kampung inipun wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat oleh karena itu penghulu selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung tentu harus bertindak sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang pemerintah kampung adapun tugas Pokok dari Kerani adalah membantu penghulu dalam mempersiapkan dan

melaksanakan pengelolaan administrasi kampung, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung. Selanjutnya adapun tugas nya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketata usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melakukan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat administrasi aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga lain.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh penghulu dan melaksanakan tugas penghulu dalam hal penghulu apabila penghulu berhalangan
- f. Melaksanakan tugas penghulu apabila penghulu diberhentikan sementara
- g. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan kampung.
- h. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 93 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan tata kerja pemerintahan Kampung kerani mempunyai tugas pasal 10 dijelaskan yaitu;

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
- b. Melaksanakan administrasi kampung
- c. Mengkordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan kampung
- d. Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kampung
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintahan kampung.

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis dan pelaksanakewilayahan
- g. menyelenggarakan kesekretariatan kampung
- h. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kampung
- i. Melaksanakan tugas dan fungsi Penghulu apabila Penghulu berhalangan sesuai dengan bidang tugas kesekretariatan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Penghulu

Selanjutnya dari uraian tugas dan fungsi kerani diatas terlihat relative banyak dan berat sehingga kemampuan seorang kerani diharapkan lebih efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Berat dan banyaknya tugas pokok dan fungsinya dalam bekerja maka sulit diharapkan agar dapat bekerja secara maksimal sehingga akibatnya kinerja kerani dipemerintahan desa relative rendah sehingga berdampak pada pemerintah kampung secara keseluruhan.

Dari sekian banyak nya tugas dan fungsi kerani yang ada apa peraturan Peraturan daerah kabupaten siak Nomor 93 tahun 2016 maka fokus penelitian penulis yaitu :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
- b. Melaksanakan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung
- c. Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan ,dan mengevaluasi penyusunan program kerja penghulu
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Penghulu apabila Penghulu berhalangan sesuai dengan bidang tugas kesekretariatan dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Penghulu

Selanjutnya Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 pasal 2 tentang perubahan penamaan desa menjadi kampung. perubahan penamaan desa bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya kabupaten siak dan dalam rangka menata

kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk desa dengan sebutan kampung di kabupaten siak.

Selain itu berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten siak Nomor 1 Tahun 2015 pasal 3 Tentang Susunan Pemerintah Kampung yaitu:

- (1) Susunan pemerintahan kampung yaitu terdiri dari:
 - a. Penghulu
 - b. Perangkat Kampung
- (2) Perangkat kampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris kampung
 - b. Unsur kewilayahan
 - c. Pelaksanan teknis lapangan
- (3) Sekretariat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Kerani sebagai pimpinan sekretaris dan
 - b. Juru tulis, staf, atau unsur pembantu kerani.
- (4) Unsur kewilayahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pembantu penghulu yang mengepalai dusu, rukun kampung dan rukun tetangga.
- (5) Pelaksanaan teknis lapangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf c melaksanakan tugas tertentu dalam kepenghuluan seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadam kebakaran, hutan dan

lahan atau yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Khususnya di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahan nama adat istiadat masing-masing dimana system pemerintahannya dibentuk oleh pemerintah pusat dan ikut bersama-sama sesuai dengan tata cara masyarakat desa tersebut, seperti sekretaris desa di sebut dengan mana Kerani yang merupakan aparatur desa dibawah Penghulu yang juga merupakan aparat dalam pemerintahan atau perpanjangan tangan dari penghulu yang juga mempunyai kewajiban menjalankan pemerintahan desa khususnya dalam masalah administrasi kampung, sehingga dapat diketahui bahwa Keranimerupakan aparat pemerintahan yang harus ditugaskan sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat dilihat dari sistem kerja Kerani bahwa Keranimerupakan anggota perangkat kampung yang secara garis besarnya bekerja dalam wilayah kerja penghulu, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan dalam administrasi terkait laporan- laporan pemerintahan kampung, maka semakin dituntut dengan adanya kerjasama yang baik dari perangkat kampung dan kemampuan yang optimal dari Keraniguna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan yang khususnya diwilayah kampung tersebut.

Keberadaan pemerintahan kampung yang juga disertai tugas untuk mengayomi masyarakatnya karena sebagai organisasi pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan

dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh baik dari tingkat RT, RW, Dusun dan kampung yang merupakan tingkat terbawah dari struktur pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan tentang tugas pemerintahan desa khususnya Kerani. Karena itu, peranan mereka begitu penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan Kampung. Oleh sebab itu diperlukan aparat kampung yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan dibebankan padanya. Seorang kerani merupakan aparat pemerintahan Kampung yang tidak lagi bekerja sebagai honor, dina dalam bekerja dibayar tanpa punya jaminan pensin. Sekarang dengan adanya kerani berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS), maka sudah seharusnya seorang Kerani itu harus berkerjasama untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya dalam bidang administrasi kampung agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Kampung Dayun merupakan salah satu nama kampung dari 11 kampung yang ada dikecamatan dayun dan terdapat 8 kecamatan yang berada kabupaten Siak. Kampung dayun mempunyai luas 84.000 Ha yang di huni oleh penduduk sebanyak 5586 jiwa yang mayoritas penduduknya bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit dan sebagian penduduk bekerja di perusahaan milik swasta yang ada di kampung dayun.

Dalam Pemerintahan kampung Kerani merupakan salah satu aparat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf membantu Penghulu dalam urusan kesekretariatan atau biasa disebut sebagai perpanjangan tangan penghulu dalam menjalankan roda pemerintahan kampung yang bertugas menjalankan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Di lihat dari kondisi riil lapangan penulis melihat masih kurangnya tingkat kedisiplinan terhadap kehadiran pegawai pemerintah Desa Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak khususnya Kerani yang dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1.1 Data Absansi Perangkat Kampung Dayun Tahun 2017, 2018 dan 2019

No	Jabatan	Kehadiran		
		2017	2018	2019
1.	Penghulu	213 hari	226 hari	219 hari
2.	Kerani	203 hari	218 hari	214 hari
3.	Juru Tulis I	220 hari	190 hari	235 hari
4.	Juru Tulis II	233 hari	234 hari	215 hari
5.	Kaur umum	224 hari	225 hari	225 hari
6.	Kaur keuangan	223 hari	233 hari	226 hari
7.	Kadus I	240 hari	167 hari	223 hari
8.	Kadus II	228 hari	187 hari	209 hari
9.	Staff	208 hari	227 hari	238 hari
10.	Staff	218 hari	130 hari	224 hari
11.	Staff	225 hari	229 hari	214 hari
12.	Penjaga Kantor	241 hari	174 hari	236 hari
13.	Tenaga Kebersihan	241 hari	235 hari	240 hari

Sumber : Kantor pemerintahan kampung Dayun 2019

Dari tabel diatas tingkat kehadiran Kerani diindikasi tergolong rendah di bandingkan dengan pegawai perangkat kampung lainnya dikarenakan tanpa keterangan, sakit dan izin. Rendahnya tingkat kehadiran kerani membuat terhambatnya kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diharapkan sedangkan dalam Peraturan PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015 secara tegas menyatakan bahwa Kerani merupakan perangkat kampung dibawah kepemimpinan Penghulu yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam bidang administrasi kampung, sehingga tingkat kehadiran yang rendah membuat kurang berjalannya tugas dan fungsi kerani sebagai perpanjangan tangan dari Penghulu yaitu melakukan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan hadir sesuai dengan bidang kesekretariatan.

Selain itu berdasarkan sepengetahuan penulis dilapangan khususnya di wilayah kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak melalui pra survey menunjukkan bahwa kurangnya kerjasama yang diharapkan belum terlaksananya sebagaimana semestinya terkait dengan pelaksanaan tugas Kerani belum berjalan seoptimal mungkin sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung di tambah lagi dengan status kerani Pegawai Negri Sipil (PNS) seharusnya di tuntut untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas sebagai aparat pemerintahan kampung. Selain itu berdasarkan sepengetahuan dan pengamatan penulis dilapangan bahwa adanya indikasi-indikasi dalam menyiapkan dan penyusunan laporan APBDes, penyusunan data-data yang berkaitan dengan administrasi kampung maupun laporan-laporan lainnya di serahkan kepada perangkat desa

lainnya khususnya juru tulis 1 hal ini terjadi karna Kurangnya pengetahuan Kerani dalam penggunaan teknologi (komputer) sehingga menghambat tugas dan fungsi dalam menjalankan tugasnya sebagai kerani yaitu melakukan kegiatan urusan administrasi kampung, membantu Penghulu dalam menyusun atau menyiapkan dan menyusun laporan-laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Sudah Seharusnya dengan perkembangan zaman khususnya di zaman modern ini Sebagai seorang penyelenggara pemerintahan dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa adanya keterbatasan usia. Disamping itu meskipun kurang dalam penguasaan teknologi kerani cukup berperan aktif didalam lingkungan masyarakat yang dapat mendorong minat masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada dipemerintahan kampung.

Selain itu kurangnya tingkat kedisiplinan terhadap aturan belum di laksanakan sesuai dengan jam kerja yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Siak Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Susunan Tata Kerja Pemerintahan Kampung Pasal XIII yaitu :

1) Pengaturan jam kerja pemerintahan kampung ditetapkan sebagai berikut :

a) Hari senin sampai dengan rabu : pukul 07.30-16.00 WIB

Waktu istirahat : Pukul 12.00-13.00 WIB

b) Kamis : Pukul 07.00-16.30 WIB

Waktu Istirahat : Pukul 12.00-13.00 WIB

c) Hari Jum'at : Pukul 07.30-16.30 WIB

Waktu Istirahat : Pukul 11.30-13.00 WIB

Dilihat dari pengamatan penulis adanya indikasi terkait jam kerja yang dilakukan yaitukhususnya kerani terkait peraturan kedisiplinan dari pemerintah kampung khususnya dalam jadwal masuk jam kerja sudah jelas tertulis dan di tetap kan dari pengamatan penulis seringkali pelayanan di lakukan lewat dari peraturan yang di tetapkan yaitu jam 08.00 lewat yang seharusnya sudah dilaksanakan kegiatan pelayanan tetapi pelayanan dilaksanakan seringkali lewat dari peraturan yang di tetapkan sehingga membuat masyarakat harus lama menunggu akibatnya pelayanan yang didapatkan kurang maksimal dan efektif. Dari pra survey yang penulis lakukan dilapangan di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sejauh ini dari Indikasi belum terlaksana dengan baik, terlihat dari fenomena sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat kehadiran kerani di bandingkan dengan perangkat desa lain nya terhitung hanya 202 hari di tahun 2017, selain itu di tahun 2018 juga tergolong tendah yaitu terhitung 218 hari dan selanjutnya di tahun 2019 terhitung kehadiran sebanyak 214 hari selama 1 tahun (365 hari). . Rendahnya tingkat kehadiran tersebut membuat tugas dan fungsi kerani tidak berjalan dengan efektif dalam mengantikan penghulu apabila penghulu berhalangan hadir sesuai dengan bidang tugas kesekretariatan.
2. Belum terlaksananya tugas dan fungsi kerani sebagaimana semestinya dalam urusan administrasi desa dan menyusun atau penyiapan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung terkait keterbatasan dalam menggunakan teknologi (Komputer) sehingga menghambat tugas dan fungsi dalam menjalankan tugasnya sebagai Kerani misalnya terkait dalam

menyusun pembuatan laporan-laporan dan penyusunan data-data dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung .

3. Kurang nya kesadaran aparat pemerintah kampung khususnya kerani dalam pelaksanaan tugas menyusun kebijakan, pengkoordinan dan pengevaluasian yang jarang dilakukanselain itu kurang kedisiplinan dalam jadwal masuk jam kerja yang seharusnya pukul 07.30 wib sudah dilaksanakan kegiatan pelayanan tetapi pelayanan dilaksanakan seringkali lewat dari peraturan yang di tetapkan.

Untuk itu berdasarkan dari fenomena diatas maka penelitian merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul penelitian sebagai berikut *“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak ”*.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa belum berjalan dengan baik maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. “Bagaimana Pelaksanaa Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak ?”.
2. Bagaimana Hambatan Kerani dalam menjalankan tugas mengenai Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak ?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kerani di kampung dayun kecamatan dayun kabupaten siak.
2. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan tugas kerani di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan Ilmu Pemerintahan.
- b. Guna praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi masyarakat kampung dayun kecamatan dayun kabupaten siak mengenai pelaksanaan tugas kerani dengan optimal atau yang diharapkan.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Menurut ndraha (dalam Labolo, 2011:34) menyatakan pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan Negara. Menurut Boediningsih (2010:1) pemerintahan dalam arti luas menurut ajaran Montesquieu dalam *trias politican* meliputi tiga kekuasaan, (1) Pembentukan undang-undang; (2) Pelaksanaan ; (3) Peradilan.Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah hanya badan pelaksana (eksekutif) saja, tidak termasuk badan perundang-undangan, peradilan dan kepolisian.

Selanjutnya pemerintah menurut supriyanto (2009:23 mengatakan pemerintahan adalah badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka/upaya mencapai tujuan Negara. Rosenthal berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti studi tentang kinerja internal eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum (dalam syafiie 2003:34)

Sedangkan menurut dharma (2002:32) pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan

dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Pemerintahan (Governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan hubungan ini berfungsi memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat (*civil* dan *public service*) yang bersifat objektif, *common to all people*, melalui pelayanan impartial menuju keseimbangan yang nyata (Awang dan Wijaya, 2012:8).

2. Ilmu Pemerintahan

Brasz (dalam syafiie, 2009:21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut poelje (dalam syafiie, 2009:21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Rosenthal (dalam syafiie, 2009:21) menyatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Dari penjelasan tersebut ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi pemerintahan melakukan kegiatan kedalam dan keluar organisasi.

Kemudian gaffar (dalam Ndraha, 2010:16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politoka (alokasi otoriatatif

nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintah sebuah Negara. Selanjutnya soewargono (dalam Ndaha, 2010:16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Menurut Ndraha (2011:7) menjelaskan ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan, jadi normatif, ideal, dan sollen), kemudian dari sudut yang kedua yaitu bagaimana senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak). Berdasarkan defenisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan. Ruang lingkup itu terdiri dari:

1. Yang diperintah
2. Tuntutan yang diperintah (jasa-publik dan layanan-civil).
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah.
5. Hubungan pemerintahan.

6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu.
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam syafiie, 2011:8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu. Sehingga melihat dari defenisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksanaan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam Negara.Salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintahan adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan publik sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

3. Konsep kebijakan publik

Dunn (2003: 132) kebijakan publik adalah pos ketergantungan yang kompleks dari pilihan pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan.

Selanjutnya menurut Wahab (2005 : 3) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengaah pada tujuan yang diusulkan seseorang kelompok dan pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya sesuatu masalah atau hambatan dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Kebijakan publik menurut prewitt (dalam agustino, 2008:6) sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye (dalam agustino, 2008:7) kebijakan publik adalah yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang di kerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Kemudian menurut indiahono (2009:18) kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah public yang dihadapi. Kebijakan public di arahkan untuk memecahkan permasalahan publik dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Salah satu bentuk kebijakan publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, yang mana Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunju kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dalam peraturan pemerintah diatas terlihat bahwa kepala desa mempunyai wewenang dalam membina kehidupan masyarakat Desa meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan kehidupan masyarakat sosial. Sehingga peran kepala desa dipala desa diperlukan dalam hal pembinaan kehidupan masyarakat untuk menjadikan keadaan masyarakat desa menjadi lebih baik.

4. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan suatu wadah atau terjadinya kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan ,dimana didalam pencapaian tujuan masing-masing perlu adanya suatu aktivitas kerjasama yang baik dari masing-masing karyawan yang ada didalam organisasi dan adanya pembagian kerja merupakan hal yang penting untuk dapat mencapai tujuan-tujuan dari organisasi tersebut.

Siagian (2003:37) mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dan hirarkis serta bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Selenjutnya organisasi menurut Barnad (dalam Manulang, (2009:59) sebagai suatu system dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Selanjutnya menurut Zulkifli (2005: 131) yang menyatakan bahwa sebuah organisasi sebagai system apapun bentuk dan juga jenisnya adalah sifatnya dinamis dan jga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Menurut Hasibuan (2002:59) berdasarkan tujuanya organisasi dapat dibagi dua, yaitu :

- a. Organisasi publik adalah organisasi yang merupakan bagian dari Negara ataupun didirikan oleh Negara, yang mana bertujuan untuk melayani masyarakat saja tanpa mengembal keuntungan.
- b. Organisasi privat adalah organisasi yang bertujuan semata-mata mencari keuntungan dan organisasi ini didirikan oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa pribadi maupun kelompok.

Dari penjelasan diatas, organisasi publik merupakan organisasi milik pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai contoh adalah kepala kantor Kantor Desa Dayun Kabupaten Siak, sedangkan organisasi privat bersifat organisasi yang fokusnya adalah bisnis atau keuntungan. Dengan demikian organisasi publik atau pemerintah mempunyai suatu orientasi yaitu

kepuasan public dan tujuan Negara, dalam pelaksanaan kegiatannya organisasi khususnya organisasi publik diperlukan manajemen sebagai pemanfaatan sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

5. Tugas dan Fungsi Sekretaris

Istilah sekretaris desa berasal dari bahasa latin yaitu, secretum yang artinya rahasia dalam bahasa perancis di sebut secretarie, dalam bahasa belanda yaitu secretares sedangkan dalam bahasa inggris disebut sekretariy yang berasal dari kata secret atau rahasia. Berdasarkan pemahaman morfologis tersebut maka seorang sekretaris harus bisa menyimpan rahasia yang tidak perlu di ketahui oleh orang lain atau pegawai (Efendy 2010:117).

Tugas adalah pekerjaan yang tanggung jawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk pemerintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. Adanya suatu pekerjaan merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Pekerjaan yang dimaksud disini adalah tugas yang diberikan atasan kepada bawahan sebagai tanggung jawab suatu jabatan atau bidang dalam organisasi.

Dengan demikian dapat menarik kesimpulan bahwa tugas adalah pekerjaan seseorang dalam organisasi atas pemberian dalam jabatan sehingga dalam melakukan tugasnya, seseorang perlu memahami tugas dan fungsi kerja dalam jabatan tersebut. Selain itu dalam melakukan tugas sebagai tanggung jawab dalam jabatan organisasi. Anda perlu kerja sama dengan bidang-bidang(seksi-seksi) lain dalam melakukan tugas setiap bidang dalam organisasi memiliki garis koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Winardi (2003: 26) tugas dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Winardi (2003:34) tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Thoha (2011: 76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Sekretaris desa atau disebut dengan nama lain keran adalah seseorang yang memiliki fungsi melaksanakan pekerjaan surat menyurat, kegiatan maupun administrasi yang memiliki kadar rahasia dan umum (1992: 12).

Sekretaris desa atau di sebut dengan nama lain kerani adalah bagian dari pemerintahan desa, yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepada desa berdasarkan ketentuan perundang-undang untuk melaksanakan tugas tersebut.

6. Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut di maksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan didepan. Menurut Siagian (2002:174) evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Artinya melalui penilaian harus dapat ditemukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah dinyatakan sebagai target. Dalam hal ini Yusuf (2000:3) menitik beratkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau social manajemen lainnya yaitu perencanaan.

Menurut Ndraha evaluasi adalah proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya. (Ndraha, 2003 : 201). Sedangkan menurut Worthen dan Sanders evaluasi adalah mengukur nilai (*merit*) dan mamfaat (*worth*) dari objek evaluasi. (dalam Wirawan, 2011 : 2).

Adapun Anderson (dalam Winarsono, 2004:166) mengemukakan bahwa evaluasi adalah “sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian tujuan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak-dampak. Evaluasi adalah merupakan suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. (Nurcholis, 2005:188)

Adapun menurut Manullang (2009:188) menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (*standart*) yang sudah ditentukan. Ada berbagai model evaluasi, tigs diantaranya sebagai berikut:

1. Model *Before-After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah dan sesudah suatu tindakan (pelalu, *treatment*). Tolak ukurnya adalah Before.
2. Model das Solen- Das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah daa solen.
3. Model Kelompok *control*-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tampa pelakuan dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control, (Ndraha, 2005:202)

Dalam kajiannya tentang pelayanan social, Boyle (dalam Suharto, 2005 : 120) Sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcomes) dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan social kinerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Sosial masukan.
2. Sosial keluaran.
3. Sosial hasil.

Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penetapan program. Dengan emikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan.
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang memungkinkan terjadi diluar sosial.

Selain itu Evaluasi adalah merupakan suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.(Nurcholis, 2005:169).

Sedangkan menurut Suharto (2008:42) evaluasi itu merupakan tahap “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan-tujuannya.
- 2) Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai seberapa lancarnya perjalanan atau proses kebijakan tersebut diimplementasikan.
- 3) Menyediakan indicator penting bagi pembuat kebijakan dimasa mendatang.

Kemudian indicator evaluasi menurut Dunn (2003:610) kriteria evaluasi mencakup 6 indikator yaitu sebagai berikut:

1. Epektifitas adalah ukuran tercapainya yang diinginkan
2. Efisiensi seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan

3. Kecukupan adalah pengukuran hasil yang telah dicapai untuk dapat memecahkan masalah
4. Pemerataan adalah agar biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat.
5. Responsivitas adalah dimana hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok yang dapat memuaskan masyarakat.
6. Ketepatan adalah agar hasil yang dicapai dapat bermanfaat.

7. Manajemen Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003:159) manajemen mempelajari bagaimana menciptakan effectiveness usaha (doing right thing) secara efficient (doin things right) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah di tetapkan. Jadi unsur-unsur manajemen adalah :

1. Tujuan
2. Fungsi, dan
3. Siklus

Kemudian Menurut Kasim (2005:5) pemanfaatan utama manajemen adalah untuk mengelola program kerja melalui proses-proses :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan perencanaan
- c. Pengawasan

Manajemen menurut Waluyo (2007:5) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian upaya organisasi dan proses

penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kemudian menurut Ndraha (2003:160) Ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen :

1. Perencanaan.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan.
4. Control pemerintahan.

Sehingga dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa manajemen pemerintahan adalah sumber daya organisasi yaitu pemerintah dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam suatu kegiatan aktifitas yang dilakukan.

8. Konsep Desa

Departemen Dalam Negeri (dalam Wasistiono dan Tahrir, 2006:8) meninjau pengertian desa ,yaitu desa dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat susunan asli adalah suatu “badan hokum” dan ada pula badan pemerintahan” yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Selanjutnya Sunarjo (dalam Wasistiano dan Tahir, 2006:9) menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan ada dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya. Masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dan menempati suatu daerah dan juga mempunyai hubungan baik antara sesamanya, pada umumnya kehidupan

masyarakat desa meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan sosial budaya yang mana keseluruhan aspek tersebut harus dijaga dan ditingkatkan sehingga masyarakat mendapat kehidupan yang lebih layak dan baik.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitin
	1	2	3
1	Tiya Tahun 2014	Evaluasi tugas sekretaris desa di kecamatan lubuk batu jaya kabupaten Indragiri hulu	Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi tugas sekretaris desa di kecamatan lubuk batu jaya kabupaten Indragiri hulu dapat dikategorikan cukup baik dengan persentase 50%.. Adapun faktor peghambat dalam pelaksanaan tugas sekretaris desa yaitu kurangnya pembinaan atau pelatihan terkait pengisian administrasi desa selain itu kurang nya kerjasama dan pengawasan atasan terhadap bawahan
2	Eeng Sumandiaka Tahun 2018	Evaluasi tugas sekretaris desa dalam menertibkan administrasi penduduk di kecamatan kemuning kabupaten Indragiri Hilir	Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi tugas sekretaris desa dalam menertibkan administrasi penduduk di kecamatan kemuning kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori cukup baik. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas nya yaitu kurang nya kedisiplinan dan pemahaman dalam pengisian buku-buku administrasi sehingga masih ada yang belum terisi.
3	Helda Olivia	Evaluasi Tugas	Berdasarkan penelitian yang

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitin
	1	2	3
	Tahun 2016	Sekretaris Desa Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	dilakukan maka dapat disimpulkan tugas sekretaris desa yang pegawai negri sipil dan bukan pegawai negri sipil sebagai dapur pemerintahan desa yang sangat penting di kecamatan seberida kabupaten Indragiri hulu dapat dikategorikan cukup baik, melalui hasil data kuisisioner dengan hasil 66%. Adapun yang menghambat pelaksanaan tugas sekretaris desa adalah kurangnya pembinaan dan pengawasanyang dilakukan terhadap perangkat desa baik dari pemerintahan kecamatan maupun daerah
4	Nurhakim Tahun 2015	Evaluasi pelaksanaan tugas sekretaris desa di desa kampung pinang kecamatan perhentian raja kabupaten Kampar	Dari pelaksanaan tugas sekretaris desa di desa kampung pinang kecamatan perhentian raja kabupaten Kampar dalam kategori cukup baik . adapun hambatan nya yaitu kurang teliti dan kurang disiplin dalam melaksanakan tugas sehingga pengurusan dokumen sering dilakukan dirumah.
5	Supriadi Tahun 2018	Pelaksanaan Tugas Sekretaris Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Kerangan Kabupaten Muaro Jambi	Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dan dalam PP Nomor di jelaskan secara rinci mengenai tugas sekretaris desa perangkat desa. Sekretari desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi

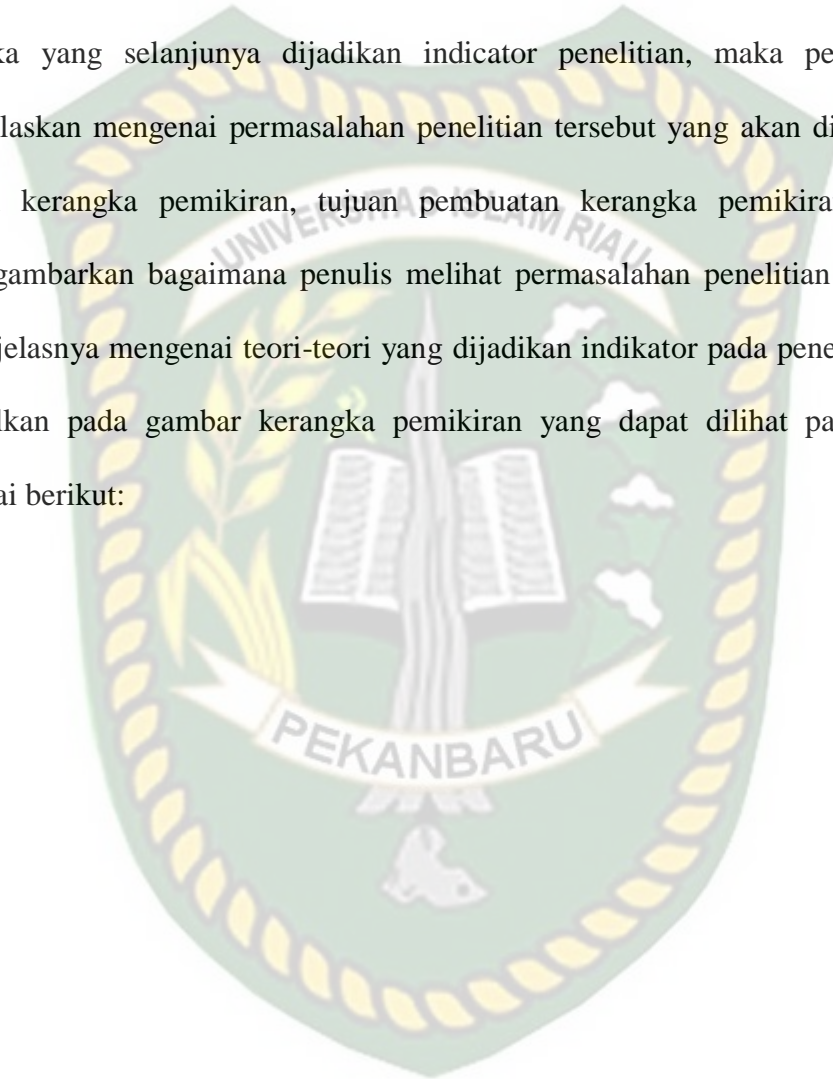
No	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitin
	1	2	3
			pemerintahan. Adapun faktor penghambat belum mampu menyelenggarakan tugas untuk membantu kepala desa dalam administrasi pemerintah desa karena faktor pendidikan yang kurang sinkron dengan status sebagai sekretaris desa kurangnya pelatihan dan pendidikan tentang topuksi, sarana dan prasarannya yang kurang mendukung dalam penyelenggaraan tertib administrasi.

Sumber : Data olahan peneliti, 2019

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas banyak terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar mengenai penelitsn yang akan penulis kaji yaitu mengenai evaluasi pelaksanaan tugas kerani di kampung dayun kecamatan dayun kabupaten siak. Maka penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat perbedaan seperti judul penelitian yang dibuat yaitu terletak pada evaluasi pelaksanaan tugas nya, lokasi dilaksanakannya penelitian, tempat yang akan digunakan , tahun penelitian juga jauh berbeda, selain itu dasar hukum yang digunakan sangat lebih kuat dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis paparkan pada latar belakang, kemudian ditentukan dengan acuan dari beberapa teori pada studi pustaka yang selanjutnya dijadikan indikator penelitian, maka penulis akan menjelaskan mengenai permasalahan penelitian tersebut yang akan digambarkan dalam kerangka pemikiran, tujuan pembuatan kerangka pemikiran ini agar menggambarkan bagaimana penulis melihat permasalahan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya mengenai teori-teori yang dijadikan indikator pada penelitian ini di tampilkan pada gambar kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar.11.1. Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani DikampungDayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak



Sumber: Modifikasi penulis, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis akan menjelaskan beberapa konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Evaluasi adalah mengukur dan menilai secara objektif terhadap kinerja Kerani Kampung Dayun Kabupaten Siak
2. Tugas adalah suatu kewajiban atau tanggung jawab seseorang mengenai suatu pekerjaan didalam organisasi atas pemberian dalam jabatan.
3. Kerani adalah seseorang aparat desa yang jabatannya berada di bawah penghulu atau kades yang juga merupakan aparat pemerintahan kampung yang berkedudukan sebagai staf membantu penghulu serta memimpin sekretaris kampung
4. Standar adalah suatu aturan atau prosedur kerja dari Kerani berdasarkan teori dan konsep ilmu
5. Fakta adalah kejadian yang sebenarnya dilapangan dimana harapan tidak sesuai dengan kenyataan
6. Melakukan urusan surat menyurat seperti kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah kampung, menyusun tata usaha kantor , menyusun laporan mengenai dokumentasi, laporan yang masuk mengenai keuangan kampung kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan mengenai kegiatan

pembangunan, kemasyarakatan dan lain sebagainya merupakan tugas dan tanggung jawab yang diukan oleh Kerani

7. Melakukan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi kampung, administrasi kampung yang terdiri dari administrasi pemerintahan, pembangunan yang mengenai seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan didesa baik dalam pembangunan fisik mau pun non fisik seperti kegiatan pembinaan, pemberdayaan serta sosial dan budaya
8. Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan sesuai bidang tugas kesetariatan tugas Kerani dalam hal menggantikan penghulu ditempat untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sementara, kemudian melaksanakan tugas dan fungsi penghulu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Konsep Variabel

Operasional variabel yang menjelaskan terhadap ukuran penelitian yang dilihat dari indikator atau operasional variabel evaluasi pelaksanaan tugas sekretaris desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel .II.1. Operasionalisasi variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
Evaluasi (penilaian) adalah perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha (2003:201).	Tugas Kerani	1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung	1. Melaksanakan proses surat menyurat 2. Melaksanakan kearsipan data dan ekspedisi 3. Membantu menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Melaksanakan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung	1. Melaksanakan administrasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan 2. Menyelenggarakan kesekretariatan kampung	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan menyusun program kerja penghulu.	1. Melakukan pengkoordiniran dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung 2. Melakukan pengevaluasi, penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan kampung 3. Menyusun kebijakan dan program kerja	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
			penghulu	
		3. Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan sesuai dengan bidang kesekretariatan.	1. Melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan penghulu. 2. Menggantikan penghulu apabila penghulu berhalangan hadir sesuai dengan bidang kesekretariatan	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber: Modifikasi penulis, 2019

F. Teknik pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penulis menetapkan penilaian penelitian terhadap variabel dan indikator dalam tingkat atau variasi, adapun penilaian tersebut yaitu: Baik, Cukup Baik, Kurang Baik. Pengukuran yang dilakukan dalam penganalisaan adalah dengan menggunakan persentase, yaitu:

1. Dapat dikatakan kategori baik apabila seluruh indikator variabel berada pada persentase $\geq 67\%$,
2. untuk kategori cukup baik apabila sebagian dari indikator variabel berada diantara 33%-66%,
3. sedangkan untuk kategori kurang baik apabila kecil dari sebagian indikator variabel yang berada pada persentase 0-33%

Adapun ukuran yang di berikan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani di desa kampung Dayun kecamatan Dayun Kabupaten Siak, maka dibuatlah pengukuran variabel :

Baik : Apabila Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani di kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berada pada kategori $\geq 67\%$

Cukup Baik : Apabila Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berada pada kategori 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berada pada kategori $\leq 33\%$.

Adapun ukuran yang berikan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggan pemerintah desa.

Baik : Apabila Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggan pemerintah desa yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggan pemerintah Kampung yang ditetapkan berada pada kategori 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah Kampung yang ditetapkan pada kategori, $\leq 33\%$.

b. Melaksanakan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung

Baik : Apabila Melaksanakan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung yang di tetapkan pada ketegori, $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila Melaksanakan administrasi pemerintahan kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung yang di tetapkan pada ketegori, 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila Melaksanakan administrasi pemerintahan kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung di tetapkan pada ketegori, $\leq 33\%$.

c. Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung dan menyusun program kerja penghulu.

Baik : Apabila Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung dan menyusun program kerja penghulu yang di tetapkan pada ketegori, $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung dan

menyusun program kerja penghulu yang di tetapkan pada ketegori, 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung dan menyusun program kerja penghulu yang di tetapkan pada ketegori, $\leq 33\%$.

d. Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan sesuai dengan bidang tugas

Baik : Apabila melaksanakan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan sesuai dengan bidang tugas kesekretariatan yang ditetapkan berada pada kategori, $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila melaksanakan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan sesuai dengan bidang tugas kesekretariatan yang ditetapkan berada pada kategori, 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan sesuai dengan bidang tugas kesekretariatan yang ditetapkan berada pada kategori, $\leq 33\%$.

G. Jadwal Penelitian

Tabel III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020 / Bulan / Hari																															
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Penyusunan UP	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x													
2	Seminar UP																									x							
3	Revisi UP																									x	x						
4	Revisi Kuesioner																												x				
5	Analisa Data																											x	X				
6	Bimbingan Skripsi																											x	X				
7	Perbaikan Bab per Bab																												X				
8	Acc. Skripsi																												X				
9	Ujian Skripsi																												X				
10	Perbaikan																												X				
11	Penggandaan Skripsi																												X				

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif dengan alasan penelitian ini menarik sejumlah sampel dari poulasi penelitian. Alat pengukuran data utama dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Sehingga data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dijadikan sebagai acuan dasar untuk menganalisis masing-masing indikator variabel diteliti, dengan metode penelitian kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di lokasi ini dikarenakan sebagai berikut;

1. masih adanya permasalahan-permasalahan dalam kegiatan pemerintahan Kampung Dayun terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan administrasi kerani sehingga diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut.
2. Karena terdapatnya perbedaan antar data yang di dapat dengan kejadian di lapangan.
3. Alasan selanjutnya adalah karena Kantor Pemerintahan Kampung Dayun tidak jauh dari tempat tinggal peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menjangkau lokasi peneliti.

C. Populasi dan Sampel

Selanjutnya adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Kampung Dayun yang terdiri dari Penghulu Kampung Dayun, Staff Kantor Kampung Dayun dan masyarakat yang melakukan administrasi di kantor Desa Kampung Dayun. Adapun sampel yang diambil dari perangkat desa yaitu terdiri dari 7 orang dan 30 masyarakat yang melakukan administrasi pada kantor Kampung Dayun, untuk penjelasan dapat dilihat table penjelasan dibawah ini.

Tabel III.I : Populasi dan sampel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel
1	Penghulu	1	1
2	Kerani	1	1
3	Kaur umum	1	1
4	Kaur keuangan	1	1
5	Juru Tulis	3	2
6	Staff	3	1
7	Masyarakat yang melakukan administrasi2019	200	30
	Jumlah	210	37

Sumber: Data dari olahan penulis,2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik penarikan sampel. Untuk Penghulu, kerani, dan Kaur menggunakan teknik *Sensus*. Teknik *Sensus* adalah sampel Yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi

dianggap kecil atau kurang dari 100 (Sugiyono, 2012:96). Sedangkan untuk masyarakat sekitar yang relatif banyak maka digunakan teknik Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel penelitian yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian .

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari responden yang merupakan sumber data utama penelitian ini, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil tanggapan responden dan wawancara yang telah ditetapkan dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Kerani di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang terdiri atas:

- a. Identitas responden
- b. Pelaksanaan tugas Kerani di desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama melalui dokumen, monografi, laporan-laporan, literatur-literatu, dan lampiran data lain yang dapat mendukung dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Keadaan geografis dan penduduk Desa di Kampung Dayun
- b. Keadaan sosial ekonomi masyarakat
- c. Tingkat pendidikan masyarakat

- d. Sarana dan prasarana yang ada Kantor Kampung Dayun
- e. Tugas dan fungsi pemerintah Kampung
- f. Dokumen lain yang sesuai dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data-data dan informasi penelitian penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang terkait fokus penelitian. Adapun pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke objek yang akan di teliti dan bersifat non partisipasi dan mencatatnya untuk di masukan kedalam hasil penelitian.

2. Kuesioner

Yaitu memberikan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk di isi oleh responden yang di harapkan dapat memberikan jawaban atau informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengupulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian.

4. Wawancara

Yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat.

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang di peroleh dalam penelitian melalui alat penelitian berupa daftar pertanyaan atau kuesioner dan daftar wawancara lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan dan di olah secara kuantitatif atau pengelompokan dan penyajian data melalui angka-angka yang berbentuk tabel data tunggal atau distribusi frekuensi. Kemudian data tersebut di presentasikan dan dijelaskan serta di analisa secara *deskriptif* sesuai dengan data yang didapat guna analisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut kemudian di ambil kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.

BAB 1V GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas

1. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan Bagian dari Kesultanan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Diawali dengan Kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II yang merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah kewedanaan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis, kemudian Kabupaten siak berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada Tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 meningkatkan statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura.

a. Geografi

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" – 00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia- Malaysia- Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah dibagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah Barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini sangat subur untuk mengembangkan pertanian, perkebunan, dan

perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan yang cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, Daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang sungai siak, karena morfologinya relatif datar. Selain sungai siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu : Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang terbesar di daerah ini adalah : Danau tembatu Sonsang, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zambrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa.

2. Profil Kecamatan Dayun

Terbentuknya Kecamatan Dayun merupakan sebagai institusi eksekutif yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Siak, merupakan apresiasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan pengurusan administrasi untuk lebih dekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah.

Kecamatan Dayun yang posisi pusat pemerintahnya ada di kampung Dayun yang kurang lebih jaraknya 21 km dari pusat kota pemerintahan siak yang dapat

ditempuh melalui jalur darat. Kecamatan Dayun merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Siak yang dimekarkan menjadi empat kecamatan yaitu : Kecamatan Dayun, Kecamatan Tualang, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Siak yang dilaksanakan tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten siak. Adapun tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintah kecamatan.

3. Profil Kampung Dayun

a. Sejarah Kampung Dayun

Kampung Dayun dahulunya diperintah oleh Antan-antan sebanyak 12 Antan. Dari ke 12 antan tersebut diantaranya adalah :

- a. Antan-antan Coil (Tuk Antan Darah Putih)
- b. Antan-antan Dongkang
- c. Antan-antan Kunal
- d. Antan-antan Cantieh.

Dari sebelah (11) kampung di kecamatan dayun, 7 kampung diantaranya pecahan dari Kampung Dayun yaitu : Kampung Banjar Seminai, Berumbung Baru, Pangkalan Makmur, Buana Makmur, Suka Mulya, Lubuk Tilan dan Merangkai.

Pada tahun 1966 sampai 1974 Kampung Dayun dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama Arifin dan pada tahun 1975 Kampung Dayun dipimpin oleh Bapak Rusli sampai tahun 1983. Setelah habis masa jabatan Rusli yang menjabat selama 8 tahun lalu di adakan pemilihan dengan calon sebanyak 2 orang yaitu Rusli dan

Marhaba yang dimemangkan oleh Rusli untuk masa jabatan 6 tahun kedepan dan ditambah 1 setengah tahun kedepan sampai tahun 2002.

Selanjutnya pada tahun 2002 kembali diadakannya pemilihan Kades/Penghulu dengan 2 orang calon yaitu Hasmar dan A.Manan, dan terpilih lah Hasmar untuk menjabat 6 tahun kedepan dan menyandang gelar haji, setelah habis masa jabatannya pada periode 2002-2008 maka, kembali diadakan pemilihan dengan 2 calon yaitu: Hasmar dan Narto yang kembali dimenangkan oleh H.Hasmar untuk periode 2008 s/d 2013 dan untuk selanjutnya pada saat ini terpilihlah Kepala Desa atau di sebut dengan penghulu periode 2013 s/d 2019 yaitu Nasya Nugrik, S.,IP seorang pemuda yang memiliki semangat perubahan segenap masyarakat Dayun untuk menuju ke arah yang lebih baik dari sebelum nya hal ini terbukti dengan terpilih kembali nya Nasya Nugrik menjadi penghulu untuk masa jabatan periode 2019 s/d 2025.

1. Demografi

Kampung Dayun terletak dalam wilayah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau yang wilayahnya berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Merempan/S. Mempura
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pelalawan/ Pkl. Makmur
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Banjar Seminai
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Benteng Hulu

2. Keadaan Sosial

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kampung Dayun berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya kebanyakan suku melayu sehingga tradisi-tradisi musyawarah dan mufakat dan kearifan local yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kampung Dayun dan hal tersebut secara umum dan efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan atau kesenjangan-kesenjangan antar kelompok masyarakat. Kampung Dayun memiliki jumlah penduduk sekitar 6899 Orang yang terdiri dari laki-laki : 3617 Orang, perempuan : 3282 Orang dan 1824 KK , yang rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk di Kampung Dayun

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3617 Orang
2	Perempuan	3282 Orang
	Jumlah	6899 Orang

Sumber: *Monografi Kantor Kampung Dayun*

Tabel.IV.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No	Usia	Jumlah
1	00-03	349 Orang
2	>03-05	261 Orang
3	>05-06	362 Orang
4	>06-12	510 Orang
5	>12-15	479 Orang
6	>15-18	655 Orang
7	>18-60	3262 Orang
	>60	1019 Orang

Sumber : *Monografi Kampug Dayun*

2. Tingkat Pendidikan

Tabel.IV.3 . Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kampung Dayun

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pra sekolah	212	258	470
2	SD	89	132	221
3	SMP	197	174	371
4	SMA	122	146	268
5	SARJANA	38	24	62

Sumber: Monografi Kantor Kampung Dayun

3. Mata Pencarian

Tabel. IV.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (100%)
1	Petani	435	23,73 %
2	Pedagang	364	19,85 %
3	Nelayan	52	2,83 %
4	Buruh	187	10,20 %
5	PNS	45	2,45 %
6	TNI	1	0,05 %
7	Pegawai Swasta	398	21,71 %
8	Buruh Tani	352	19,18 %
	Total	1833	100.00

Sumber : Monografi Kampung Dayun

4. Agama

Penduduk Kampung Dayun mayoritas memeluk agama Islam dan ada juga sebagian memeluk agama lain yaitu agama Kristen dan Katolik sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. IV. 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	4121 Orang	59,78 %
2	Protestan	1884 Orang	27,33 %
3	Katolik	888 Orang	12,88 %
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	6893	100 %

Sumber: Monografi Kantor Kampung Dayun

Ada pun kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di Kampung Dayun secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel. IV.6. Jumlah Sarana dan Prasarana Kampung Dayun

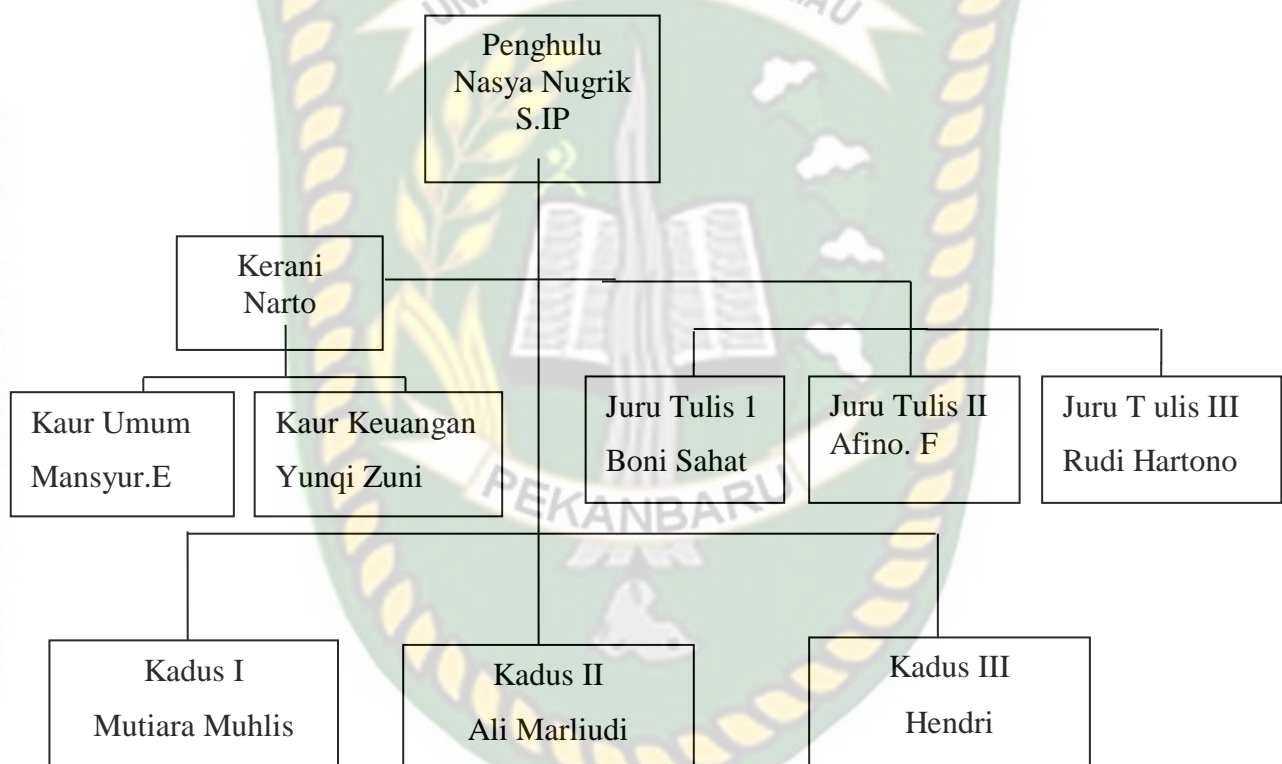
No	Sarana/Pra Sarana	Jumlah
1	Aula	1
2	Kantor Kampung	1
3	Puskesmas	1
4	Polindes	1
5	Masjid	6
6	Musholla	5
7	Paud	3
8	TK	4
9	SD	4
10	SMP	3
11	SMA	2

Sumber : Monografi Kampung Dayun

B. Struktur Tata Kerja Pemerintahan Kampung Dayun

Struktur organisasi Kampung Dayun Kecamatan Dayun menganut sistem kelembagaan pemerintahan kampung dengan pola minimal selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar :Struktur Tata Kerja Pemerintahan Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Pada Peraturan Bupati Siak Nomor 93 Tahun 2016



Sumber: Kantor Pemerintahan Kampung Dayun 2019

Adapun aparatur pemerintahan kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Penghulu | : 1 Orang |
| 2. Kerani | : 1 Orang |
| 3. Perangkat Kampung | : 11 Orang |

4. Kepala Dusun : 3 Orang
5. Badan Permusyawaratan Kampung : 11 Orang

C. Uraian Tugas Dan Fungsi Pokok Pemerintahan Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Penghulu mempunyai tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada Struktur Organisasi diatas di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 93 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung yaitu sebagai berikut :

1. Penghulu

Penghulu berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan kampung, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat kampung. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang di maksud penghuku mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupsn masyarakat kampung
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian kampung
- i. Mengembangkan pendapatan masyarakat kampung

- j. Mengembangkan kehidupan social dan budaya masyarakat kampung
- k. Mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.
- n. Mewakili kampung didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud diatas penghulu juga mempunyai kewajiban yaitu sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender

- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang akuntabel, transparan, professional, evfektif dan efisien, bersih serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di kampung
- h. Mengelola keuangan dan aset kampung
- i. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung
- k. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di kampung
- l. Menyelesaikan perselisihan kampung
- m. Mengembangkan potensi dan sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- n. Membina dan melestarikan nilsi sosial budaya masyarakat kampung
- o. Mengembangkan perekonomian masyarakat kampung
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat kampung

2. Kerani

Ada pun tugas kerani sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

- b. Melaksanakan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung
- c. Mengkordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan kampung
- d. Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kampung
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintahan kampung.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis dan pelaksana kewilayahan
- g. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kampung
- h. Melaksanakan tugas dan fungsi Penghulu apabila Penghulu berhalangan sesuai dengan bidang tugas kesekretariatan dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Penghulu.

Kerani mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
- b. Pelaksana dalam melakukan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung
- c. Pelaksana dalam mengkordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan kampung

- d. Pelaksana dalam mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kampung
- e. Pelaksana dalam melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintahan kampung.
- f. Pelaksana dalam Pengkoordinasian pelaksanaan teknis dan pelaksana kewilayahan
- g. Pelaksana dalam memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kampung
- h. Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Penghulu apabila Penghulu berhalangan sesuai dengan bidang tugas kesekretariatan dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Penghulu

3. Kepala Urusan

Kepala urusan umum mempunyai tugas dibidang urusan umum adapun tugas nya sebagai berikut:

- a. Melakukan urusan surat menyurat
- b. Melaksanakan pengelolaan arsip pemerintah kampung
- c. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, secara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintahan kampung.
- d. Melaksanakan pengelola barang investasi kampung.
- e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan kampung.
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan diluar urusan umum dan perencanaan yang diberikan oleh penghulu dan kerani.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana yang dimaksud kepala urusan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah kampung
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga kampung
- c. Pelaksanaan urusan inventaris kampung
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat kampung
- e. Pelaksaaan rancangan peraturan kampung, peraturan penghulu dan keputusan penghulu
- f. Pelayanan umum
- g. Penyiapan rapat
- h. Pelayanan umum

4. Kepala Dusun

- a. Membantu penghulu dalam melaksanakan tugas dan kegiatan penghulu.
- b. Melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
- c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penghulu.
- d. Melaksanakan peraturan kampung, peraturan penghulu, dan keputusan penghulu.

Dalam melaksanakan tugas nya kepala dusun mempunyai kewajiban yang harus di jalankan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah
- b. Melaksanakan peraturan kampung, peraturan penghulu dan keputusan penghulu
- c. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- d. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
- e. Sebagai Pelaksanaan keamanan, ketertiban dan pembinaan kebudayaan
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung
- g. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kebudayaan
- h. Pelaporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepala dusun.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat permasalahan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, maka dari itu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian peneliti mengambil data melalui instrument penelitian yaitu wawancara, observasi dan kuesioner, yang dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh responden penelitian dan selanjutnya wawancara dengan penghulu serta melakukan tinjauan penelitian pada lokasi penelitian untuk melihat langsung kegiatan pelaksanaan tugas Kerani di Kampung Dayun yang mana dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan penelitian. Adapun data yang peneliti dapatkan dari responden penelitian yaitu pemerintah desa dan masyarakat yang berada di Kampung Dayun dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian terhadap keseluruhan responden yang digunakan sebagai sampel, maka akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan observasi yang dilakukan akan dijelaskan sebagai berikut.

Identitas responden berguna untuk mengetahui beberapa banyak responden, jenis kelamin, usia dan pendidikan. Hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi responden yang terdapat dalam penelitian ini

sehingga dapat lebih memperjelas mengenai hasil dari penelitian ini. Untuk lebih jelasnya identitas responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.V.1. Distribusi jenis kelamin Responden Penelitian

No	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase (%)
1	Laki-laki	21	57%
2	Perempuan	16	43%
	Jumlah	37	100 %

Sumber : Data Penelitian, 2019

Dari tabel V.I. diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini responden perangkat kampung dan masyarakat lebih didominasi oleh laki-laki yaitu 21 orang dan untuk responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 16 orang . Selanjutnya distribusi responden penelitian menurut berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel .V.2. Distribusi Responden Penelitian Pemerintahan Kampung Berdasarkan Umur.

No	Umur	Populasi	Persentase (%)
1	< 30 Tahun	15	40%
2	30-39 Tahun	11	30%
3	40-49 Tahun	7	19%
4	>50 Tahun	4	11%
	Jumlah	37	100 %

Sumber : Data Penelitian 2019

Tingkat kematangan umur sangat mempengaruhi jawaban responden dalam sebuah penelitian, dapat diketahui bahwa umur juga mempengaruhi pengalaman

seseorang dalam beraktivitas pada lingkungan nya, begitu juga dalam berorganisasi, untuk itu peneliti mengelompokan data responden menjadi 4 kelompok umur. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada kelompok umur >30 tahun, sebanyak 15 atau persentase 40% berada pada kelompok umur 30 sampai dengan 39 tahun, terdapat 11 orang responden atau berada pada persentase 30%, Selanjutnya pada kelompok umur 40 sampai dengan 49 tahun sebanyak 7 orang responden atau persentase 19%. Kelompok umur >50 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 11%. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini relative cukup dewasa yaitu sebanyak 15 orang responden dengan persentase 40% dengan kategori umur dibawah atau kecil dari 30 tahun.

Pendidikan merupakan salah satu yang masuk dalam kriteria yang akan ditetapkan untuk dapat melihat tingkat analisa dalam menjelaskan informasi dalam sebuah penelitian maka dari itu juga ditentukan juga pada pendidikan yang dimiliki oleh responden peneliti sehingga dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap tingkat kebenaran dan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan penelitian ini jumlah pendidikan responden merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi .

Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda yaitu mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat Sarjana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang digolongkan dalam tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.V.3. Distribusi Responden Peneliti Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Populasi	Persentase (%)
1	SD	11	29%
2	SMP	8	21%
3	SMA	13	35%
4	SARJANA	5	13%
	Jumlah	37	100%

Sumber : Data Penelitian 2019

Dari data diatas terlihat bahwa responden penelitian ini didominasi oleh tingkat pendidikan SMA Berjumlah 13 responden atau persentase 35% dan untuk Sekolah Menengah Pertama berjumlah 8 Orang atau 8 % untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar berjumlah 11 orang atau 13 % . sehingga jika dilihat dari tingkatan pendidikan responden paling banyak di pemerintah kampung dan masyarakat Kampung Dayun adalah tingkat SMA yaitu sebanyak 13 orang dengan persentase 35% .

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.

Kampung atau disebut dengan istilah lain yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan kampung dipimpin oleh seorang penghulu dan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh seorang kerani dan perangkat kampung lainnya.

Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena pemerintahan dan perangkat kampung adalah administrator sebagai penyelenggara dalam aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik dari pemimpin nya yaitu penghulu maupun perangkat nya seperti hal nya kerani berkedudukan sebagai unsur staff membantu penghulu dalam menjalankan roda pemerintahan kampung yang bertugas menjalankan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 93 Tahun 2016 tentang susunan tata kerja pemerintahan kampung.

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh seorang kerani mulai dari urusan surat menyurat tata usaha kantor, kearsipan dan menyusun laporan-laporan mengenai kegiatan-kegiatan baik pembangunan maupun kemasyarakatan dan sebagainya. Setelah melakukan penelitian pengumpulan dan data pengelolaan data maka dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel di bawah ini:

Tabel. V.4. Distribusi Jawaban Responden Pemerintahan Desa Dayan Mengenai Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

No	Item Penelitian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melaksanakan proses urusan surat menyurat	2 (28,57%)	5 (71,42%)	-	7
2	Melaksanakan kearsipan data dan ekspedisi	2 (28,57%)	5 (71,42%)	-	7
3	Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah kampung	1 (14,28%)	5 (71,42%)	1 (14,28%)	7
Jumlah		5	15	1	21
Rata-Rata		2	5	0,3	7
Persentase		28,57%	71,42%	14,28%	100 %

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, 2019

Dari tabel V.4 dapat diketahui bahwa indikator penelitian pelaksanaan tugas kerani dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung mayoritas responden pemerintahan kampung menyatakan baik sebanyak 2 dengan rata-rata 2 responden atau dengan persentase 28,57% , responden yang menyatakan cukup baik dengan rata-rata 5 responden atau dengan persentase 71,42% dan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 1 responden atau dengan persentase 14,28%. Ada pun tanggapan responden terkait urusan surat

menyurat serta laporan-laporan sering terkendala karena kurangnya kedisiplinan terhadap tugas dan fungsi selain itu kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi yang mengakibatkan masalah dalam pelayanan. Kemudian distribusi frekuensi jawaban masyarakat mengenai indikator melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. V.5 Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Mengenai melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung

N O	Item Penelitian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melaksanakan proses urusan surat menyurat	11 (37%)	19 (63%)	-	30
2	Melaksanakan kearsipan data dan ekspedisi	9 (30%)	16 (53%)	5 (17%)	30
3	Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah kampung	7 (23%)	19 (63%)	4 (14%)	30
Jumlah		27	54	9	90
Rata-Rata		9	18	3	30
Persentase		30%	60%	10%	100 %

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat dari jawaban responden tentang melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung bahwasanya ada pun responden yang menjawab baik dengan rata-rata sebanyak 9 orang dengan persentase 30%.

Ada pun responden yang menjawab cukup baik rata-rata menjawab sebanyak 18 orang responden dengan persentase 60%, sedangkan yang untuk responden yang menjawab kurang baik rata-rata menjawab sebanyak 3 orang responden dengan persentase 10%.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sudah cukup baik dilihat dari rata-rata banyak nya responden yang menjawab cukup baik sebanyak 18 orang responden dengan persentase 60% , namun perlu untuk ditingkatkan dalam menjalankan tugas agar berjalan dengan baik dalam melayani kepentingan masyarakat khusus nya dalam bidang pemerintahan. Dari hasil wawancara mengenai pelaksanaan tugas kerani dengan Penghulu kampung dayun yaitu, mengatakan bahwa :

Dalam pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sudah cukup baik tetapi ada sedikit kendala karna kurang disiplin dalam menjalankan tugas.

mengenai tugas urusan surat menyurat, kearsipan dan penyusunan laporan-laporan di serahkan kepada perangkat masing-masing terutama saya selalu berkoordinasi dengan juru tulis 1 dikarenakan ada sedikit kendala karena sumber daya manusia yang kurang mengenai penguasaan teknologi .(wawancara dengan kerani kampung dayun, 2019)

Dari hasil wawancara di atas terlihat diketahui bahwa dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung kurang berjalan dengan efektif kurangnya pengetahuan teknologi kerani dalam urusan laporan penyelenggaraan kampung berkoordinasi dengan juru tulis 2. Hal ini di ketahui melalui observasi yang penulis lakukan terlihat bahwa hampir setiap kegiatan penyusunan laporan seperti di serahkan kepada juru tulis 2. Dari data tabel, data wawancara serta hasil observasi dilapangan dapat disimpulkan indikator melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu kepala desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemeritah desa dalam kategori cukup baik.

2. Melaksanakan Administrasi Kampung Dan Menyelenggarakan Kesekretariatan Kampung

Melaksanakan kegiatan administrasi yaitu kegiatan pencatatan data dan informasi dari semua jenis kegiatan yang di lakukan di kantor baik administrasi keuangan, administrasi pembangunan, administrasi umum dan lain nya selain itu menyelenggarakan kesekretariatan kampung. Setelah melakukan penelitian pengumpulan data dan pengelolaan data maka dapat didapatkan jawaban responden yang dapat dilihat paa tabel dibawah ini:

Tabel V.6 Distribusi jawaban Responden Pemerintahan Kampung Mengenai melaksanakan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung.

N O	Item Penelitian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melaksanakan administrasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan	3 (42,85%)	4 (57,14%)	-	7
2	Menyelenggarakan kesekretariatan kampung	1 (14,28%)	6 (85,71)	-	7
Jumlah		4	10		21
Rata-Rata		2	5		7
Persentase		29%	71%		100 %

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, 2019

Dari tabel V.6 Dapat kita ketahui bahwa indikator penelitian dalam melaksanakan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung untuk jawaban responden pemerintahan kampung menyatakan baik sebanyak 3 orang responden dengan persentase 42,85%, kemudian jawaban responden cukup baik sebanyak 4 orang responden persentase 57,14%. Jadi rata-rata responden perangkat kampung menjawab cukup baik hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan tugas kerani dalam melaksanakan administrasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan cukup baik.

Kemudian jawaban responden perangkat kampung tentang pelaksanaan tugas kerani dalam menyelenggarakan kesekretariatan kampung, responden yang menjawab baik sebanyak 1 orang dengan persentase 14,28% sedangkan untuk

responden yang menjawab cukup baik sebanyak 6 orang responden dengan persentase 85,71%. Rata-rata responden menjawab cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kerani dalam menyelenggarakan kesekretariatan kampung berjalan cukup baik .

Maka berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kerani di kampung dayun kecamatan dayun kabupaten siak dilihat dari indikator melaksanakan Administrasi Kampung Dan Menyelenggarakan Kesekretariatan Kampungsesuai dengan hasil diatas dinilai cukup baik dengan persentase 71%.

Tabel V.7 Distribusi jawaban Responden masyarakat mengenai melaksanakan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung.

No	Item Penelitian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melaksanakan administrasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan	10 (34%)	16 (53%)	4 (13%)	30
2	Menyelenggarakan kesekretariatan kampung	11 (37%)	17 (56%)	2 (7%)	30
Jumlah		21	33	6	60
Rata-Rata		10,5	16,5	3	30
Persentase		35%	55%	10%	100 %

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, 2019

Dari tabel V.7 Dapat kita ketahui bahwa indikator penelitian dalam melaksanakan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung untuk jawaban responden pemerintahan kampung menyatakan baik sebanyak 10 orang responden dengan persentase 34 %, kemudian jawaban

responden cukup baik sebanyak 16 orang responden persentase 53%. Sedangkan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 orang dengan persentase 13% . Jadi rata-rata responden perangkat kampung menjawab cukup baik hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan tugas kerani dalam melaksanakan administrasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan cukup baik.

Kemudian jawaban responden tentang pelaksanaan tugas kerani dalam menyelenggarakan kesekretariatan kampung, responden yang menjawab baik sebanyak 11 orang dengan persentase 37% sedangkan untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 orang responden dengan persentase 56%. Sedangkan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang dengan persentase 7%.Rata-rata responden menjawab cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan tugas kerani dalam menyelenggarakan kesekretariatan kampung berjalan cukup baik .

Maka berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kerani di kampung dayun kecamatan dayun kabupaten siak dilihat dari indikator melaksanakan Administrasi Kampung Dan Menyelenggarakan Kesekretariatan Kampung sesuai dengan hasil diatas dinilai cukup baik dengan persentase 55%.

Dari hasil wawancara mengenai pelaksanaan tugas kerani dengan Penghulu kampung dayun, mengatakan bahwa :

Dalam melaksanakan tugas administrasi kampung sudah berjalan cukup baik tersusun dengan baik hanya saja kurang koordinir dari kepala administrasi, seharusnya setiap kegiatan harus koordir supaya tidak adanya terterlambatan

dan diarahkan supaya kegiatan administrasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. (wawancara dengan penghulu kampung dayun, 16 Desember 2019)

Administrasi yang dilakukan berjalan dengan baik mengenai laporan administrasi tersusun dengan baik hanya saja ada sedikit keterlambatan. (wawancara dengan kerani di kampung dayun kecamatan dayun, 16 Desember 2019)

Hal ini diketahui dari observasi yang dilakukan penulis bahwa administrasi kampung yang dilakukan cukup baik dilihat dari laporan pertanggung jawaban yang ada di kantor pemerintah kampung dayun tergolong cukup lengkap dari tahun ketahunnya maka dapat disimpulkan indikator melaksanakan administrasi dan kesekretariatan berada pada kategori cukup baik.

3. Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung dan menyusun program kerja penghulu.

Melaksanakan pengkoordinasian dan pengevaluasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung dan menyusun program kerja penghulu merupakan salah satu tugas yang dilakukan kerani setiap kegiatan yang dilakukan di koordinir atau di arahkan oleh kerani dan dievaluasi sebagai kepala dari kegiatan administrasi yang dilakukan di kantor pemerintah kampung. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengelolaan data maka dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel dibawah ini:

Tabel V.8 Distribusi jawaban responden pemerintahan desa mengenai Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung dan menyusun program kerja penghulu.

N O	Item Penelitian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung.	2 (29%)	5 (71%)	-	7
2	Melakukan pengevaluasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung	2 (29%)	3 (42%)	2 (29%)	7
3	Menyusun kebijakan dan program kerja penghulu	2 (29%)	5 (71%)	-	7
Jumlah		6	13	2	21
Rata-Rata		2	4	1	7
Persentase		29%	57%	14%	100 %

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, 2019

Dari tabel V.8 Dapat kita ketahui bahwa indikator penelitian dalam Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung dan menyusun program kerja penghulu. untuk jawaban responden pemerintahan kampung menyatakan baik sebanyak 2 orang responden dengan persentase 29% , kemudian jawaban responden cukup baik sebanyak 5 orang responden persentase 71 %. Jadi rata-rata responden perangkat kampung menjawab cukup baik hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan

tugas kerani dalam melakukan pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung cukup baik.

Kemudian jawaban responden tentang pelaksanaan tugas kerani dalamMelakukan pengevaluasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung , responden yang menjawab baik sebanyak 2 orang dengan persentase 29% untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 3 orang responden dengan persentase 57% sedangkan untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang responden dengan persentase 14% . Rata-rata responden menjawab cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kerani dalam menyelenggarakan kesekretariatan kampung berjalan cukup baik .

Selanjutnya adapun jawaban responden dalam menyusun kebijakan dan program kerja penghulu, adapun responden yang menjawab baik sebanyak 2 orang dengan persentase 29%,kemudian responden yang menjawab cukup baik sebanyak 5 orang dengan persentase 71%, selanjutnya tidak ada responden yang menjawab kurang baik .

Maka berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kerani di kampung dayun kecamatan dayun kabupaten siak dilihat dari indikator Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung dan menyusun program kerja penghulu sesuai dengan hasil diatas dinilai cukup baik dengan persentase 57 %.

Tabel V.9 Distribusi jawaban responden masyarakat mengenai Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintah kampung dan menyusun program kerja penghulu.

NO	Item Penelitian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung.	8 (27%)	21 (70%)	1 (3%)	30
2	Melakukan pengevaluasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung	9 (30%)	16 (53%)	5 (17%)	30
3	Menyusun kebijakan dan program kerja penghulu	11 (37%)	12 (40%)	7 (23%)	30
Jumlah		28	49	13	90
Rata-Rata		9,3	16,4	4,3	40
Persentase		31%	54%	15%	100 %

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, 2019

Dari tabel V.9 Dapat kita ketahui bahwa indikator penelitian dalamMelakukan mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung untuk jawaban responden pemerintahan kampung menyatakan baik sebanyak 8 orang responden dengan persentase 27% , kemudian jawaban responden cukup baik sebanyak 21orang responden persentase 70 %. Sedangkan jawaban responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 1 orang dengan persentase 3% Jadi rata-rata responden perangkat kampung menjawab cukup baik hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan tugas kerani dalam melakukan

pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung cukup baik.

Kemudian jawaban responden tentang pelaksanaan tugas kerani dalamMelakukan pengevaluasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung , responden yang menjawab baik sebanyak 11 orang dengan persentase 37% untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 162orang responden dengan persentase 40% sedangkan untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 orang responden dengan persentase 23%. Rata-rata responden menjawab cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kerani dalam menyelenggarakan kesekretariatan kampung berjalan cukup baik .

Selanjutnya adapun jawaban responden dalam menyusun kebijakan dan program kerja penghulu, adapun responden yang menjawab baik sebanyak 11 orang dengan persentase 37 %,kemudian responden yang menjawab cukup baik sebanyak 12 orang dengan persentase 40%, selanjutnya untuk jawaban responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 orang dengan persentase 23%. Dari hasil wawancara mengenai pelaksanaan tugas kerani dengan Penghulu kampung dayun, mengatakan bahwa :

Pelaksanaan tugas kerani cukup berjalan dengan baik hanya kurang menkoordinir dari kerani sehingga tugas yang dilakukan kurang berjalan dengan baik. Sedangkan kerani merupakan kepala administrasi di kantor jadi seluruh kegiatan perangkat seharusnya di koordinir dan diarahkan setiap laporan-

laporan yang di buat di evaluasi oleh kerani. (Wawancara dengan Penghulu Kampung Dayun, 16 Desember 2019)

Kegiatan mengkoordinir, pengevaluasian cukup berjalan dengan baik sejauh ini dan setiap perangkat sudah mengetahui tugas dan fungsinya jadi saya percayakan semua kepada masing-masing perangkat (wawancara dengan kerani 16 Desember 2019)

Dari hasil wawancara diatas dilihat memang dalam melaksanakan pengkoordiniran dan pengevaluasian kurang di lakukan karena kerani mempercayakan perangkat sudah mengetahui setiap tugas nya masing-masing dan memang jarang dilakukan pengkoordiniran atau arahan dengan perangkat kampung lainnya. Hal ini juga dapat penulis ketahui dari observasi dilapangan bahwa kerani tidak ada melakukan arahan dengan perangkat kampung dan setiap anggota melaksanakan tugas nya masing-masing tanpa ada penggarahan yang dilakukan kerani yang bertanggung jawab sebagai kepala administrasi.

Maka berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kerani di kampung dayun kecamatan dayun kabupaten siak dilihat dari indikator Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung dan menyusun program kerja penghulu sesuai dengan hasil diatas dinilai cukup baik dengan persentase 54%.

4. Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan sesuai dengan bidang kesekretariatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan penghulu.

Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu dalam bidang kesekretariatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan penghulu merupakan tugas yang dilakukan kerani ketika penghulu berhalangan hadir dan digantikan untuk sementara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah peneliti melakukan pengumpulan dan pengelolaan data maka dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel dibawah ini:

Tabel V.10 Distribusi jawaban responden pemerintah desa dalam Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan sesuai dengan bidang kesekretariatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan penghulu.

NO	Item Penelitian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu yang diberikan penghulu	3 (43%)	4 (57%)	-	7
2	Menggantikan penghulu apabila penghulu berhalangan hadir sesuai dengan bidang kesekretariatan.	2 (29%)	4 (57%)	1 (14%)	7
Jumlah		5	8	1	21
Rata-Rata		2,5	4	0,5	7
Persentase		29%	57%	14%	100 %

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden terkait pelaksanaan tugas kerani dalam indikator melaksanakan tugas yang diberikan penghulu adapun responden yang menjawab baik sebanyak 3 orang dengan persentase 43% , dan untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 4 orang dengan persentase 57%, maka dapat disimpulkan jawaban responden dalam pelaksanaan tugas yang diberikan penghulu cukup baik.

Kemudian jawaban responden tentang pelaksanaan tugas kerani menggantikan penghulu apabila penghulu berhalangan hadir sesuai dengan bidang kesekretariatan, ada pun responden yang menjawab baik sebanyak 2 orang dengan persentase 29% sedangkan untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 4 orang responden dengan persentase 57 % kemudian untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 1 orang dengan persentase 14% . jadi adapun rata-rata responden menjawab cukup baik dengan persentase 57%.

Tabel V.11 Distribusi jawaban responden masyarakat dalam Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan sesuai dengan bidang kesekretariatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan penghulu.

NO	Item Penelitian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu yang diberikan penghulu	12 (40%)	18 (60%)	-	30
2	Menggantikan penghulu apabila penghulu berhalangan hadir sesuai dengan bidang kesekretariatan.	8 (27%)	12 (40%)	10 (33%)	30
Jumlah		20	30	10	40
Rata-Rata		10	15	5	30
Persentase		33%	50%	17%	100 %

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden terkait pelaksanaan tugas kerani dalam indikator melaksanakan tugas yang diberikan penghulu adapun responden yang menjawab baik sebanyak 12 orang dengan persentase 27% , dan untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 18 orang dengan persentase 40%, maka dapat disimpulkan jawaban responden dalam pelaksanaan tugas yang diberikan penghulu cukup baik

Kemudian jawaban responden tentang pelaksanaan tugas kerani menggantikan penghulu apabila penghulu berhalangan hadir sesuai dengan bidang kesekretariatan, ada pun responden yang menjawab baik sebanyak 8 orang dengan persentase 29% sedangkan untuk responden yang menjawab cukup baik

sebanyak 12 orang responden dengan persentase 57 % kemudian untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 10 orang dengan persentase 33% . jadi adapun rata-rata responden menjawab cukup baik dengan persentase 57%.

Dari hasil wawancara mengenai pelaksanaan tugas kerani dengan Penghulu kampung dayun, mengatakan bahwa :

Dalam melaksanakan tugas ada kerani menggantikan tugas saya apabila berhalangan hadir, tetapi sering juga tidak hadir terkadang menitip pesan izin tak hadir kepada perangkat karna ada urusan tertentu. Mengenai data-data dan laporan-laporan penyelenggaraan kampung sering diserahkan kepada juru tulis 2 ketika kerani tidak dapat hadir.(wawancara dengan penghulu kampung Dayun , 16 Desember 2019)

Memang saya jarang hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan ada urusan yang harus di urus di luar kantor tetapi kadang hadir sebentar untuk melihat dan mengkonfirmasi kepada bawahan jika ada masyarakat yang ingin melakukan administrasi terkait kegiatan pelayanan dikantor.(wawancara dengan kerani, 16 Desember 2019)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa memang ada kerani menggantikan tugas penghulu apabila penghulu berhalangan hadir tetapi sering juga tidak hadir dikarenakan ada urusan tertentu, dari observasi yang dilakukan penulis memang jarang hadir di kantor jika ada masyarakat yang berurusan mengkonfirmasi kepada perangkat lainnya dan menunggu untuk bertemu dikantor.

Setelah memaparkan pembahasan mengenai indikator secara satu persatu kemudian untuk mengetahui keseluruhan dari jawaban responden maka di lakukan rekapitulasi tabel responden penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.12 Distribusi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

N O	Item Penelitian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung.	11 (30%)	23 (62%)	3 (8%)	37 (100%)
2	Melaksanakan administrasi kampung dan menyelenggarakan kesekretariatan kampung.	12,5 (34%)	21,5 (58%)	3 (8%)	37 (100%)
3	Melakukan mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kampung dan menyusun program kerja penghulu	11,4 (31%)	20,3 (55%)	5,3 (14%)	37 (100)
4	Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan sesuai dengan bidang kesekretariatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan penghulu.	12,5 (34%)	19 (51%)	5,5 (15%)	37 (100%)
Jumlah		47,4	83,8	16,8	148
Rata-Rata		11,85	20,95	4,2	37
Persentase		32%	57%	11%	100 %

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian, 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat Evaluasi Pelaksanaa Tugas Kerani Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berada pada kategori Cukup Baik dengan persentase 57%.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Kerani Dikampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Adapun yang menjadi faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas kerani dalam menjalankan tugasnya yaitu :

1. Pelayanan masih manual jadi sering membuang waktu.
2. Kurang nya pembinaan dan pengetahuan kerani dalam menjalankan tupoksi mengakibatkan lemahnya sumber daya manusia perangkat kampung mengakibatkan selalu terjadi lempar tanggung jawab antar sesama perangkat yang mengakibatkan miss komunikasi sehingga kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.
3. Kurangnya .pelatihan terhadap perangkat kampung khususnya kerani hal ini terbukti dari kurang menguasai dalam penggunaan teknologi .
4. Kurangnya disiplinnya kerani dalam menaati waktu jam kerja kantor.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kerani di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak maka penulis dapatkan hasil dari penelitian melalui kuesioner, dan observasi yang dilakukan dapat diambil dari keseluruhan kesimpulan pelaksanaan tugas kerani di kampung dayun kecamatan dayun kabupaten siak dalam kategori Cukup Baik dengan persentase 57 % .

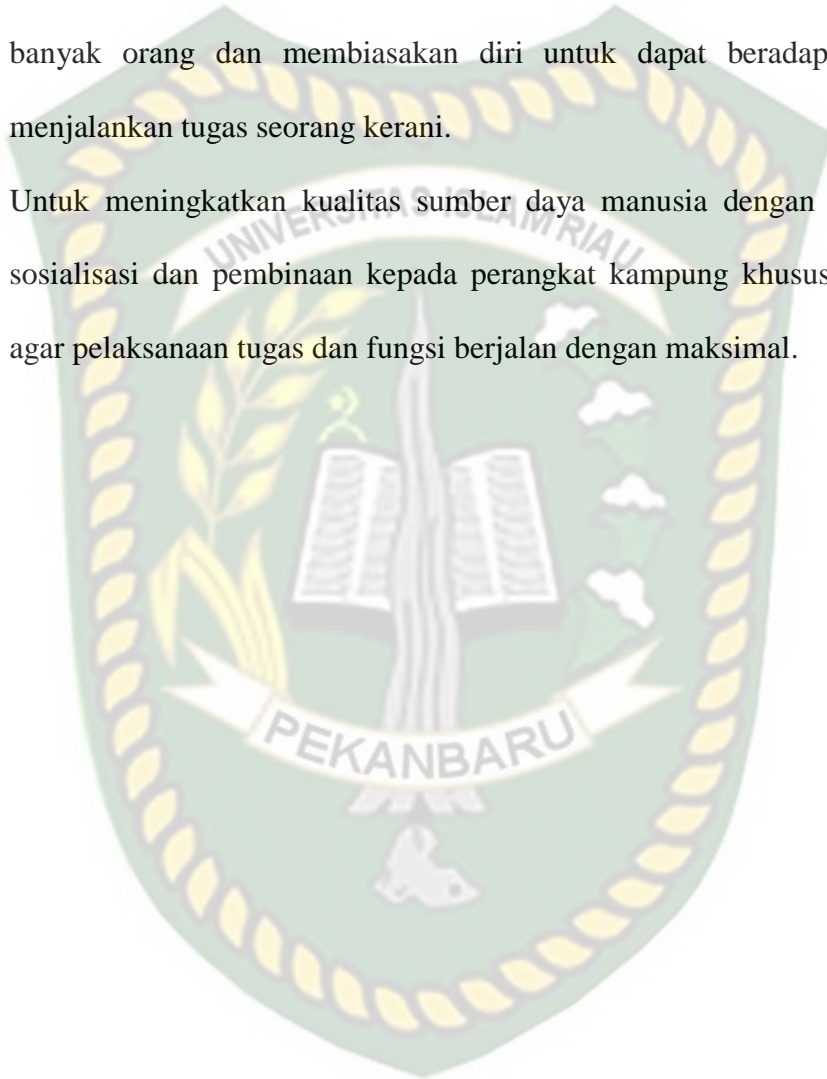
B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Adapun dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara dalam pemerintahan kampung khususnya kerani harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin agar tercapainya pelayanan yang baik sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Kerani sebagai perpanjangan tangan dari penghulu harus tegas dan meningkat kan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan mengarah kan perangkat kampung lain nya agar anggota perangkat kampung lain nya mematuhi tugas dan perintah kerani.
3. Selain itu untuk Kerani Kampung Dayun diharapkan untuk lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah kampung terkait kehadiran dan jam kerja agar masyarakat yang berurusan tidak menunggu terlalu lama, ketidak disiplinan dapat mengganggu masyarakat

dalam melaksanakan urusan yang ada di kantor pemerintahan kampung dayun.

4. Diperlukan latihan dan keberanian untuk tampil berbicara dihadapan banyak orang dan membiasakan diri untuk dapat beradaptasi dalam menjalankan tugas seorang kerani.
5. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada perangkat kampung khususnya kerani agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan maksimal.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustio Leo, 2008 , "*Dasar-Dasar Kebikakan Publik*", Bandung, Alfabeta.

Amsyah, Zulkifli. 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: Gramedia.

Awang, Azam, Wijaya, Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru.

Dharma, Setiawan, salam. 2002. *Otonomi Daerah dalam prespektif lingkungan dan sumberdaya*. Jakarta, Djembatan

Dunn, Wiliam, Salam. 2003. *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta Gadjahmada Press

Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan publik*. Yogyakarta. Gadjamada Press

Labono, Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Manullang. 2009. *Manajemen*. Gadjah Mada University. Press. Yogyakarta.

Miftah, Thoha, 2011. *Prilaku organisasi konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi*, Jakarta, Rineka Cipta

_____, 2010. *Keybernologi sebagai sebuah rekontruksi ilmu pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta

_____, 2011. *Keybernologi (Ilmu Pemerintahan baru)*. Jakarta, Rineka Cipta

Nurkholis, Hanif, 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta

—, 2011 *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga

Siagian, P.Sondang.2002. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta. Rineka Cipta Media

—, 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep dimensi dan strateginya*. Jakarta. Bumi Aksara

Suharto, Edi .2005. *Pekerjaan social industry, CSR yang efektif*, Alfabeta: Bandung

Syafiie, InuKencana,2003. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta. Bumi Aksara

—, 2009. *Pegantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Aditama

Wasistiono, Sadu Dan Tahir, Irwan, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Fokus

Winarno, Budi. 2004. *Kebijakan Publik ,Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta Caps

Winardi, j. 2003. *Teori organisasi dan pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yusuf, Farida. 2000, *Evaluas Program*.PT.Rineka Cipta. Jakarta.

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bukupedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013. Pekanbaru, Fisipol UIR.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

